

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

Sekretariat BPTJ

LAPORAN TRIWULAN | 2021

Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia



<http://bptj.dephub.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2021**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang pengelolaan transportasi perkotaan, khususnya untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2021 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama Triwulan I tahun 2021 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selama kurun waktu Triwulan I tahun 2021. Selain itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada periode berikutnya.

Jakarta, April 2021
SEKRETARIS
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK



Rosita Sinaga, S.H., M.M.
NIP. 19620904 198903 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG	4
1.2. PERJANJIAN KINERJA.....	5
BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	7
2.1. CAPAIAN KINERJA	7
2.2. REALISASI ANGGARAN	10
BAB III PENUTUP	12
3.1. KESIMPULAN	12
3.2. SARAN.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ Tahun 2021	6
Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan I Tahun 2021	7
Tabel 3 Hasil Survey Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ. Error! Bookmark not defined.	
Tabel 4. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK Triwulan I Tahun 2021	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek merupakan unit kerja penunjang Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ. Pelaksanaan tugas Sekretariat BPTJ dalam rangka memenuhi fungsinya untuk (1) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan; (2) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, penyusunan perjanjian dan kerjasama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum; (3) Penyiapan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum; dan (4) Penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pembentukan Sekretariat BPTJ merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telah ditetapkan pada tanggal 27 November 2018. Pembentukan Organisasi ini selanjutnya diikuti dengan penetapan Peta Jabatan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dimana Sekretariat memiliki 4 (empat) unit kerja Eselon III yang terdiri dari Bagian Perencanaan dan keuangan, Bagian Kepegawaian dan Umum, Bagian Hukum, dan Bagian Hubungan Masyarakat.

Dengan ditetapkannya PM 110 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan kepada BPTJ dalam mengelola penyelenggaraan transportasi Jabodetabek, maka perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan lainnya terkait penyelenggaraan transportasi Jabodetabek, salah satunya dengan mencabut PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan kepada Kepala BPTJ, sehingga kewenangan pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mutlak ada di BPTJ. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan I Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPTJ sangat

didukung oleh kinerja unit kerja Eselon III di lingkungan BPTJ.

Pada tahun 2020, Sekretariat BPTJ melakukan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memberikan arah kebijakan serta pedoman dalam memetakan prioritas-prioritas pembangunan untuk mencapai indikator kinerja utama BPTJ, yaitu mewujudkan transportasi terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Renstra Sekretariat BPTJ dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta pengukuran kinerja, kinerja anggaran, dan kinerja organisasi Sekretariat BPTJ.

Sekretariat BPTJ pada tahun 2021 memiliki delapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berorientasi *outcome* dan merupakan *core business* yang menjadi dasar analisis capaian kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan I Tahun 2021. Hal ini merupakan tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Area Akuntabilitas oleh Kemenpan RB yang mengamanatkan bahwa indikator kinerja harus berorientasi *outcome* dan merupakan *core business* dari BPTJ

Selanjutnya, Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2021 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama Triwulan I tahun 2021 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target IKK yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh BPTJ selama kurun waktu Triwulan I tahun 2021. Selain itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada periode berikutnya.

1.2. PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk tahun 2021 telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun secara berjenjang mengacu pada konsep Renstra BPTJ Tahun 2020-2024. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV dengan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon II dengan Eselon I.

Sasaran program Sekretariat BPTJ merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPTJ, serta capaian dan permasalahan yang dihadapi oleh BPTJ pada periode sebelumnya. Selanjutnya, dari satu Indikator Kinerja Program (IKP) dijabarkan menjadi delapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
SK9 Meningkatkan Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKK18 Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	86
	IKK19 Indeks Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	3,15
	IKK20 Indeks Reformasi Hukum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	73
SK10 Meningkatkan Kapailitas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	1
	IKK22 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	75
	IKK23 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	87
SK11 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKK24 Indeks Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	3,5
SK12 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKK25 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	%	75

BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Indikator Kinerja Program Sekretariat BPTJ. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran program yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat BPTJ Tahun 2021 dapat tercapai.

Berdasarkan penetapan target pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPTJ, berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ pada Triwulan I tahun 2021:

Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK 2021	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian
IKK18 Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	86	0	-	100%
IKK19 Indeks Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	3,15	0	-	100%
IKK20 Indeks Reformasi Hukum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	73	0	-	100%
IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	68	0	-	100%
IKK22 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	75	0	-	100%

IKK23 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	87	0	-	100%
IKK24 Indeks Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	3,7	0	-	100%
IKK25 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	%	100	28	62,48	223%

2.1.1. IKK18 Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Nilai SAKIP BPTJ diperoleh dari hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada 9 (sembilan) unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Evaluasi terhadap implementasi SAKIP tahun 2020 masih belum selesai dilaksanakan sehingga nilai SAKIP BPTJ pada Triwulan I masih belum ada. Pada tahun 2019, BPTJ memperoleh nilai 78,04 dengan predikat BB.

2.1.2. IKK19 Indeks Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Indeks Maturitas SPIP diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam rangka mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit organisasi Kementerian Perhubungan. Nilai SPIP saat ini masih belum diketahui karena masih belum ada pelaksanaan SPIP yang disebabkan oleh diundangkannya peraturan baru oleh BPKP pada bulan April 2021. Dari hasil penilaian terakhir (2020), berdasarkan modus dari seluruh Eselon II, BPTJ mendapatkan skor 3,133 dengan tingkat maturitas "Terdefinisi."

2.1.3. IKK20 Indeks Reformasi Hukum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Reformasi hukum yang dimaksud dalam IKK20 adalah deregulasi peraturan-peraturan di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Deregulasi peraturan merupakan proses pencabutan, penyederhanaan, atau perbaikan terhadap peraturan-peraturan, khususnya di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Ruang lingkup peraturan yang dideregulasi meliputi Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan, Peraturan Kepala BPTJ, dan Keputusan Kepala BPTJ.

Perhitungan capaian kinerja belum dapat dilaksanakan karena peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh BPTJ hanya sebagian kecil yang sudah diarsip oleh Bagian Hukum. Sedangkan indikator untuk perhitungan capaian kinerja membutuhkan peraturan-peraturan yang bersifat deregulasi. Proses pengumpulan arsip-arsip peraturan masih dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan nantinya akan ditelaah mana peraturan-peraturan yang dapat digunakan menjadi indikator perhitungan indeks deregulasi peraturan yang menjadi dasar perhitungan capaian kinerja yang dimaksud. Nilai terakhir Indeks Reformasi Hukum BPTJ pada tahun 2020 sebesar 72.

2.1.4. IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Penilaian Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada saat ini sedang dalam tahap penilaian oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dimana penilaian tersebut diakumulasi dengan semua unit kerja Eselon I dan akan dinilai oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada akhir tahun 2021 ini.

2.1.5. IKK22 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Sementara hingga triwulan 2, Indeks Tata Kelola Manajemen ASN masih belum diketahui datanya karena masih menunggu penyelesaian pengisian kuesioner.

2.1.6. IKK23 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ dihitung dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, sehingga didapatkan:

$$\text{Indeks Pengelolaan Keuangan} = (60\% \times NKA) + (40\% \times NPA)$$

dimana:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran

NPA : Nilai Pelaksanaan Anggaran

2.1.7. IKK24 Indeks Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IPP dihitung dengan memperhitungkan enam (6) aspek yang meliputi:

- 1) Kebijakan pelayanan;
- 2) Profesionalisme SDM;

- 3) Sarana prasarana pelayanan publik;
- 4) Sistem informasi pelayanan publik;
- 5) Konsultasi dan pengaduan; dan
- 6) Inovasi.

Indeks yang diperoleh dari hasil perhitungan pada tahun 2020 sebesar 3,49 yang dikategorikan “Baik”. Namun dari keenam aspek tersebut, terdapat penilaian yang tidak optimal dikarenakan jumlah dan kriteria sampel Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum mewakili sumber data yang sebenarnya.

2.1.8. IKK25 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Berkaitan dengan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, pada saat ini akan dilaksanakan pengisian kuesioner kepada seluruh pegawai di lingkungan BPTJ.

Adapun unsur-unsur yang menjadi penilaian kualitas penyelenggaraan perkantoran BPTJ yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan Kantor
2. Pemenuhan Kebutuhan Daya dan Jasa
3. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Mesin Kantor
5. Peningkatan dan Pemeliharaan Perangkat Komputer
6. Pengadaan Barang (Peralatan dan Mesin Perkantoran)

2.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Sekretariat BPTJ berdasarkan pagu awal tahun 2021 adalah sebesar Rp.86.164.007.000 dan sampai dengan bulan Maret tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp.12.214.056.342.

Pagu anggaran dan realisasi per Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi TW I	% Capaian
IKK18 Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	7.208.345.000	186.300.560	2,58%
IKK19 Indeks Maturitas SPIP Badan Pengelola	500.000.000	-	0,00%

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi TW I	% Capaian
Transportasi Jabodetabek			
IKK20 Indeks Reformasi Hukum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	2.622.356.000	529.754.700	20,20%
IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	562.425.000	1.281.000	0,23%
IKK22 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	7.226.770.000	533.418.684	7,38%
IKK23 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	3.176.753.000	383.978.234	12,09%
IKK24 Indeks Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	5.965.750.000	158.079.540	2,65%
IKK25 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	58.901.608.000	10.421.243.624	17,69%

BAB III PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

1. Capaian kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan I Tahun 2021 masih belum bisa mencapai target yang ditentukan pada Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan;
2. Meskipun kegiatan-kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan sudah terlaksana, namun realisasi anggaran Sekretariat BPTJ sampai dengan Triwulan I tahun 2021 juga masih kecil, hanya sebesar 14,18%.

3.2 SARAN

Dari analisis dan permasalahan telah teridentifikasi untuk Triwulan I tahun 2021, berikut beberapa saran yang diberikan agar capaian kinerja BPTJ dapat meningkat pada Triwulan II dan seterusnya:

1. Melaksanakan dan menentukan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja;
2. Sekretariat BPTJ agar dapat melakukan administrasi terhadap nilai Indikator Kinerja Kegiatan yang nilainya berasal dari pihak eksternal apabila sudah dilakukan penilaian;
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan pagu yang tersedia dengan merealisasikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya yang sampai saat ini masih belum terlaksana.